

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI BADAN
KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Dewa Ayu Mia Natalia
NIM 2115644173**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGLI

Dewa Ayu Mia Natalia

2115644173

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli melalui pendekatan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 hingga tahun 2024. Fokus penelitian ini diarahkan pada Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Instrument analisis yang digunakan mencakup rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bangli masih menghadapi berbagai tantangan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka yang sangat rendah yaitu 22,92% dan 23,06%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, sementara partisipasi masyarakat dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah cukup efektif, namun terjadi penurunan signifikan dari 116,19% menjadi 83,17%. Rasio efisiensi juga belum optimal, dengan tingkat efisiensi sebesar 102,18% dan 99,01%, menandakan pengeluaran yang besar untuk memperoleh pendapatan. Rasio aktivitas menunjukkan kriteria cukup baik, dengan proporsi belanja operasional sebesar 67,43% dan 73,85%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, APBD, Rasio Keuangan, Efektifitas, dan Efisiensi.

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE IN THE FINANCE, REVENUE, AND ASSETS AGENCY OF BANGLI REGENCY

Dewa Ayu Mia Natalia

2115644173

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Bangli Regency Government through a financial ratio analysis approach to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the fiscal years 2023 to 2024. The focus of this study is directed at the Regional Finance, Revenue, and Asset Agency of Bangli Regency as the agency responsible for regional financial management..

This study employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including document analysis, interviews, and direct observation. The analytical instruments used include financial independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, and activity ratios.

The results of the study indicate that the financial performance of Bangli Regency still faces various challenges. The regional financial independence ratio shows a very low figure of 22.92% and 23.06%. This indicates that dependence on central government transfer funds is still very high, while community participation in contributing to Regional Original Revenue (PAD) is still low. The effectiveness ratio indicates that the realization of local revenue is fairly effective, but there has been a significant decline from 116.19% to 83.17%. The efficiency ratio is also not yet optimal, with efficiency levels of 102.18% and 99.01%, indicating high expenditures to generate revenue. The activity ratio shows satisfactory criteria, with operational expenditure proportions of 67.43% and 73.85%.

Keywords: Regional Financial Performance, APBD, Financial ratios, Effectiveness, and Efficiency.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Abstrak	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Pemerintah Daerah	9
2. Keuangan Daerah	10
3. Kinerja	11
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
5. Pendapatan Asli Daerah	13
6. Pengertian Analisis Rasio	14
7. Jenis Rasio Keuangan Daerah	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Alur Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26

B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
D. Keabsahan Data.....	29
E. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP	44
A. Simpulan	44
B. Implikasi.....	45
C. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2024	5
Tabel 4. 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah	36
Tabel 4. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah	38
Tabel 4. 3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah	40
Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Belanja Operasi	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKPAD Kabupaten Bangli	35



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKPAD Kabupaten Bangli35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan informan Pak Dewa Rai
- Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Tenta
- Lampiran 3 : Data tahun 2023 BKPAD
- Lampiran 4 : Data tahun 2024 BKPAD



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia serta satu di antara kebijakan Pemerintah Indonesia yang memposisikan daerah pada fokus pembangunan. Pemerintah daerah (Pemda) diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri lewat diterapkannya otonomi daerah. Evaluasi kinerja Keuangan (Pemda) menjadi krusial sekali sebab Pemda mempunyai tanggung jawab besar terkait pengelolaan pengeluaran, pendapatan, pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat (Akib et al., 2024).

Kinerja atau performa ialah cerminan terkait perwujudan terlaksananya suatu kebijakan untuk memanifestasikan sasaran, tujuan, visi dan misi institusi yang ada dalam strategik perencanaan. Kinerja dapat terlihat hanya jika seseorang atau pun kumpulan orang tersebut punya kualifikasi keberhasilan yang telah dipilih. Pengujian kinerja merupakan Langkah untuk menaksir kesesuaian praktik dengan tujuan yang dipilih. Suatu institusi pada hakikatnya berasal dari penyusunan rencana strategis, yaitu bermula dari visi dan misi, pedoman dan prosedur. Selanjutnya tupoksi harus mengacu pada rencana strategis yang sudah dipilih (Akib et al., 2024).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional

keuangan pemerintahan daerah, yang menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja aspek finansial, dimana anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintahan daerah. APBD juga disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan tugas pembangunan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan dengan aktifitas pelayan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dari setiap daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, redistribusi atau sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah, di dalam pengeluaran dana demi

pelaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu bentuk nyata rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (anggaran), untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (periode anggaran). Hal ini menunjukkan APBD digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam hal penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran yang menyangkut hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, kinerja atau *performance* merupakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai alat ukur keberhasilan sebuah pekerjaan. Pengukuran kinerja adalah suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan sebuah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan maupun belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan hasil yang sudah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berpikiran kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektifitas melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Manullang, 2024)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diseraahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke keuangan daerahnya untuk menilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Akib et al., 2024)

Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Bali. Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bangli dari tahun

2023 sampai dengan 2024 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah, dapat diketahui peningkatan keuangan daerah yang dihadapi kabupaten Bangli antara lain yaitu tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1
Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2024

Tahun	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan Belanja
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain PAD yang Sah	
2023	255.527.244.826,00	1.114.886.421.100,00	131.215.725.326,00	1.501.609.391.252,00
2024	268.536.208.013,00	1.164.612.703.174,00	10.252.256.928,00	1.443.401.168.115,00

Sumber: BKPAD Kabupaten Bangli 2025

Analisis rasio keuangan APBD sangat perlu dilakukan, dalam rangka melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bangli dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari satu periode dengan periode sebelum-sebelumnya sehingga dapat diketahui terdapat kecenderungan yang terjadi apakah Pemerintah Kabupaten Bangli telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, serta efektif. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dengan berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Bnagli tahun anggaran 2023-2024, terlihat adanya beberapa kondisi yang menunjukkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sangat rendah, yaitu sebesar 22,92% pada tahun 2023 dan 23,06% pada tahun 2023, yang mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah

pusat serta rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, rasio efektivitas PAD mengalami penurunan signifikan dari kategori sangat efektif pada tahun 2023 sebesar 116,19% menjadi cukup efektif pada tahun 2024 sebesar 83,17%. Rasio efisiensi juga menunjukkan kinerja yang belum optimal, dengan nilai 102,18% pada tahun 2023 dan 99,01% pada tahun 2024, menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan masih relative tinggi. Sementara itu, rasio aktivitas menggambarkan bahwa proporsi belanja operasional lebih dominan dibandingkan belanja pembangunan, sehingga berpotensi membatasi ruang fiskal untuk kegiatan produktif jangka panjang. Fenomena dalam penelitian ini adalah kondisi nyata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2023-2024?
2. Bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2023-2024?

C. Batasan Masalah

1. Analisis kinerja keuangan daerah hanya difokuskan pada Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Kabupaten Bangli.
2. Periode analisis kinerja keuangan yang digunakan adalah selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2023-2024.
3. Indikator yang digunakan dalam analisis adalah rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktifitas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada Pemerintahan Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2023-2024.
- b. Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2023-2024.

2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat empiritis yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, serta wawasan akademik dalam bidang keuangan daerah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan

bisa dijadikan pedoman dan tambahan sumber Pustaka yang berhubungan dengan bidang akuntansi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Untuk menambah referensi bagi civitas akademi dan mahasiswa lain yang ingin memahami dan mengembangkan kajian terkait manajemen keuangan daerah.

3) Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan tambahan serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa tentang pengukuran kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Bangli dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, dan rasio aktivitas. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dari segi pendapatan asli daerah (PAD) berada pada kriteria sangat rendah yakni sebesar 22,92% pada tahun 2023 dan 23,06% pada tahun 2024 dalam kemandirian keuangan namun pemerintah daerah Kabupaten Bangli ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi dan partisipasi masyarakat masih rendah.
2. Rasio efektivitas pemerintahan daerah Kabupaten Bangli semakin menurun yaitu pada tahun 2023 berada pada kategori sangat efektif dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan kategori cukup efektif dan menandakan terjadinya penurunan kemampuan realisasi pendapatan dari target yang telah ditentukan.
3. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2023 dengan kategori tidak efisien dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan kategori kurang efisien yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan

dalam perolehan PAD cukup tinggi sehingga perlu dilakukan efisiensi pemungutan serta pengelolaan PAD.

4. Rasio aktivitas pemerintah Kabupaten Bangli berada pada kriteria cukup baik yakni 67,43% pada tahun 2023 dan 73,85% pada tahun 2024 dalam aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Bangli terdapat keseimbangan dan alokasi belanja pembangunan masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disampaikan dengan implikasi sebagai berikut:

1. Implementasi Teoritis

Secara keseluruhan, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan dan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengukuran kinerja keuangan daerah sebagai instrument evaluasi akuntabilitas publik. Analisis rasio keuangan seperti kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan aktivitas mampu memberikan objek terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka yang ingin menambah wawasan terkait kinerja keuangan pemerintah.

2. Implementasi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih terarah mengenai peningkatan PAD dengan menggali

potensi daerah secara optimal, meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran untuk menekan biaya pemungutan PAD, Mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dan bisa mengalokasikan anggaran belanja operasional dan belanja pembangunan untuk menciptakan dampak pembangunan yang lebih bagus di pemerintahan daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah pada APBD pemerintah daerah Kabupaten Bangli, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran pada pemerintah daerah Kabupaten Bangli pada masa yang akan datang. Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Bangli meningkatkan kualitas PAD yang belum maksimal seperti pajak daerah, retribusi jasa umum, dan pemanfaatan aset daerah, serta melakukan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, sehingga tidak ketergantungan lagi dari dana perimbangan pemerintah pusat.
2. Sebaiknya, pemerintah daerah Kabupaten Bangli menggunakan analisis rasio keuangan daerah pada APBD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Bangli diharapkan dapat memantau perkembangan setiap komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, serta melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi potensi yang memerlukan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, Dhimas, W. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12615* Other thesis, IPDN.
- A. Putri, R. Heriyanto. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal ilmiah ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi*, 2(5), 1-11. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1166>
- J. Tanjung. (2023). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019-2023. *http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20579*
- M. Saifrizal. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 2(3), 202-211. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- P. Purba, A. Silitonga. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104-115. <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>
- Mulyaningsih, S. Sunaningsih, & S. Nasehati. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. <https://doi.org/10.29100/insp.v17i1.1563>
- Aithan, A. Frinaldi, & N. Putri. (2025) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan APBD Tahun 2024. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jeam/issue/view/141>
- U. Septiani, A. Taher, & C. Dewi. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 5, Mei 2025*, 2222-2227. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7462>
- H. Amalia, B. Pratiwi. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020. *Jurnal Akuntansi erapan Dan Bisnis*, 2(1), 72-81. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3197>
- F. Manimbaga, J. Sondakh, & S. Pinatik. (2021). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(3), 982-992. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33923>

S. Mohammad, D. Paul, E. Saerang et al. (2023). Analisis Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Pada LRA BPKAD Kota Tidore Kepulauan.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/issue/view/35>

90

